

INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA

**(Studi Pada Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas,
KabupatenTulang Bawang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

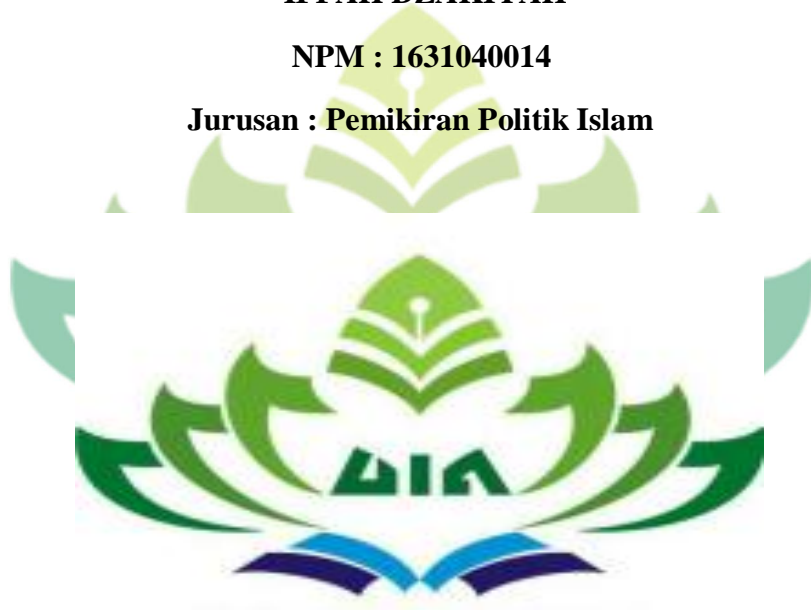
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

IFFAH DZAKIYAH

NPM : 1631040014

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1442 H/2021 M

**INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA
DESA**

**(Studi Pada Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas,
Kabupaten Tulang Bawang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin



Oleh :

IFFAH DZAKIYAH

NPM : 1631040014

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Abd. Qohar, M.Si

Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M.I.P

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA (Studi Pada Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, KabupatenTulang Bawang)

Oleh

IFFAH DZAKIYAH

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya membahas dana desa sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat yang implementasi nya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang terjadi dalam integritas kepala desa dalam mengelola dana desa di Desa Pendowo Asri kecamatan Dente Teladas kabupaten Tulang Bawang. Dalam realita nya masih ada pelaksanaan bidang-bidang penggunaan anggaran dana desa di desa Pendowo Asri tidak berjalan secara optimal dan adanya kesenjangan terkait dengan keterbukaan, karena dalam hal tersebut masih ada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana sistematika penggunaan anggaran dana desa yang dikelola oleh aparatur desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perwujudan integritas kepala desa, bidang-bidang yang dituangkan serta konsistensi program pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan proses pengumpulan data melalui dokumen berupa data observasi, waawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan teknik verifikasi. Pada proses penelitian ini peneliti menggunakan teori Hendrajatno dan Budi Rahardja mengenai perwujudan nilai integritas.

Hasil dari penelitian ini yaitu sosok kepala desa dalam mengelola dana desa tidak memenuhi perwujudan integritas. Kriteria yang tidak terpenuhi tersebut yaitu pada aspek kejujuran dari kepala desa itu sendiri karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan anggaran pengelolaan dana desa secara keseluruhan, bidang-bidang yang tersalurkan dalam penggunaan anggaran dana desa itu berupa pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sikap kesesuaian program yang diberikan kepala desa sudah sesuai berdasarkan peraturan desa Pendowo Asri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017-2023.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Iffah Dzakiyah
NPM	: 1631040014
Jurusan/Prodi	: Pemikiran Politik Islam
Fakultas	: Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Integritas Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa (Studi di Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang)”*** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Bandar Lampung
Peneliti,

Iffah Dzakiyah
NPM. 1631040014

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA (Studi Pada Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang)

Nama Mahasiswa : Iffah Dzakiyah

NPM : 1631040014

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

**Untuk di munagosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munagosyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Abd. Oohar, M.Si

NIP. 196010211991031002

Drs. Agustamsyah, M.I.P

NIP. 196801041994031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

NIP.197801302011012004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA (Studi Pada Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang)”** disusun oleh **Iffah Dzakiyah, NPM 1631040014, Program Studi Pemikiran Politik Islam** telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal : **Senin, 11 Januari 2021.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A** (.....)

Sekretaris : **Yoga Irawan, M.Pd** (.....)

Penguji I : **Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si** (.....)

Penguji II : **Abdul Qohar, M.Si** (.....)

Penguji Pendamping III : **Drs. Agustamsyah, M.I.P** (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,**



**Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag
NPM. 196003131989031004**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa: 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai cinta kasih sayang dan hormat untuk orang-orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama saya menuntut ilmu:

1. Terima kasih teruntuk kedua orang tua ku tersayang Bapak Wahdan dan Ibu Supiyati yang telah merawat ku dari kecil hingga dewasa seperti sekarang ini. Kalian penyemangat terhebatku, selalu mendoakan ku, memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini, selalu memberikan dukungan, pengorbanan yang luar biasa, dan memberikan kasih sayang yang tidak terhingga.
2. Terima kasih untuk kedua orang tua asuhku Bapak H,Jainuri dan Ibu Hj,Suprihatin yang mengasuh ku ketika aku duduk dibangku Madrasah Aliyah. Terima kasih atas segala kasih sayangnya dan didikan nya untuk selalu menjadi wanita yang kuat.
3. Terima kasih kakak ku Aziz Faisal, saudari kembar ku Ismah Azizah dan adik-adik ku Muhammad Naufal, Syifa Nur Azizah dan Muhammad Fadil. Kalian sumber energi positif ku yang selalu menguatkan, selalu menghibur ketika aku lelah dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan proses perkuliahan di perguruan tinggi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Iffah Dzakiyah dilahirkan di Bogor pada tanggal 20 November 1997. Peneliti merupakan putri ke-2 dari 5 bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Wahdan dan Ibu Supiyati.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Pasiran Jaya, diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian peneliti melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Dente Teladas Tulang Bawang lulus pada tahun 2013. Selanjutnya di tahun 2013 mengenyam pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Purbolinggo Lampung Timur lulus pada tahun 2016. Syukur alhamdulillah kemudian peneliti melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016, tercatat sebagai salah satu mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI).

Dalam riwayat organisasi, peneliti menjadi Bendahara Umum dalam organisasi eksternal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ushuluddin Komisariat UIN Raden Intan Lampung, dan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam. Peneliti juga pernah menjadi Panitia Pelaksana Komisi Pemilihan Umum.



Bandar Lampung,

Peneliti

Iffah Dzakiyah

NPM 1631040014

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan ridho ALLAH SWT, tugas akhir perkuliahan skripsi dengan judul **“Integritas Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Pada Desa Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang)”** ini dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Pemikiran Politik Islam.

Keseluruhan penulisan karya ilmiah ini terdapat bantuan dari berbagai pihak dalam hal berupa bimbingan, petunjuk, saran, kritik, informasi, dan pengarahan oleh penulis. Oleh karena itu, melalui pengantar ini peneliti menghanturkan rasa hormat dan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Bapak Dr.H. M. Afif Anshori, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Abd. Qohar, M.Si selaku pembimbing 1 dan bapak Drs. Agustamsyah, M.I.P selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktu untuk membimbing selama proses pengajuan judul skripsi.
6. Ibu Eska Prawisudawati Ulp, M.Si dan Bapak Yoga Irawan, M.Pd yang turut membantu dalam proses kelancaran skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama terkhusus di Prodi Pemikiran Politik Islam.
8. Seluruh staf dan kepegawaian dari tingkat Dekanat sampai pada tingkat paling bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberi kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin atas diperkenankannya penulis meminjam literature yang dibutuhkan,
10. Kepala Desa, Aparatur Desa beserta jajarannya, dan Tokoh Masyarakat khususnya yang ada di Desa Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan izin dan banyak memberikan bantuan selama mengadakan penelitian.
11. Terimakasih kepada sahabatku Indah Ayu Lestari, Wina Apriliani Pusea, Suci Purwanti dan Rifky Prasetyo kalian sahabat yang selalu memberikan semangat, menjadi penghibur, dan selalu menemani disetiap proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sahabatku, Fesya Nur Pertiwi, Retha Nabila Yustia, Indra, Achmad Sidiq dan Ramco Yudi Gustiarto Setiawan yang telah yang

telah mendukung, memberikan motivasi, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada adik tingkatku Nuril Eva yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini dari awal hingga akhir.
14. Teman-teman HMI, PMII dan khususnya teman-teman ikatan ku IMM. Terima kasih telah memberikan penulis pengalaman organisasi, kebersamaan, arti dari sebuah ikatan pertemanan dan memotivasi penulis.
15. Sahabat perjuangan Pemikiran Politik Islam A, B dan seluruh teman-teman angkatan 2016 serta seluruh teman-teman KKN kelompok 223 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang didapat bersama-sama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat.

Bandar Lampung,

Peneliti

Iffah Dzakiyah

NPM. 1631040014



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Metode Penelitian.....	5
BAB II INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA	
A. Integritas Kepala Desa	8
1. Konsep Integritas	8
a. Pengertian Integritas.....	8
b. Fungsi Integritas.....	9
c. Manfaat Integritas	10
2. Konsep Kepala Desa.....	10
a. Pengertian Kepala Desa.....	10
b. Syarat-Syarat Menjadi Kepala Desa	11
c. Tugas Kepala Desa.....	11
d. Wewenang Kepala Desa.....	11
e. Kewajiban Kepala Desa	12
f. Pemberhentian Kepala Desa.....	12

B. Pengelolaan Dana Desa	13
1. Konsep pengelolaan dana desa	13
2. Kebijakan pengelolaan dana desa	13
3. Asas-asas pengelolaan dana desa	15
4. Tujuan pengelolaan dana desa	16
5. Manfaat pengelolaan dana desa	16
C. Tinjauan Pustaka	17
D. Kerangka Pikir	18

BAB III INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA

A. Gambaran Umum Desa Pendowo Asri	19
1. Sejarah Desa Pendowo Asri	19
2. Letak Geografis dan Demografis	20
3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat	22
4. Struktur Pemerintahan Desa	27
5. Bidang-bidang Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa	32

BAB IV INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA

A. Perwujudan Integritas Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa	36
B. Konsistensi dalam Pelaksanaan Bidang-bidang Penggunaan Anggaran Dana Desa	41

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	48
B. Rekomendasi	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	5
Tabel 1.2 Kerangka Pikir	18
Tabel 1.3 Nama Dan Masa Jabatan Kepala Desa	19
Tabel 1.4 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Pendidikan	22
Tabel 1.5 Data Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	22
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Ternak	25
Tabel 2.3 Jumlah Kepemilikan Tempat Usaha	25
Tabel 2.4 Jumlah Sosial Budaya Masyarakat	26
Tabel 2.5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	28
Tabel 3.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	29
Tabel 3.2 Nama-Nama Kepala Dusun (Kadus)	29
Tabel 3.3 Nama-Nama Ketua Rukun Tetangga (RT)	30
Tabel 3.4 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	32
Tabel 3.5 Bidang Pelaksanaan Pembangunan	33
Tabel 4.1 Bidang Pembinaan Masyarakat	34
Tabel 4.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	34
Tabel 4.3 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Desa Pendowo Asri	
Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Hendri.....	56
Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Santoso	57
Gambar 1.4 Wawancara dengan Bapak Marwanto	57
Gambar 1.5 Wawancara dengan Bapak Yansen Rele.....	58
Gambar 2.1 Wawancara dengan Bapak I Nyoman	59
Gambar 2.2 Wawancara dengan Bapak Sarju	60
Gambar 2.3 Wawancara dengan Bapak Sudibyo.....	61
Gambar 2.4 Wawancara dengan Ibu Wahyu	61
Gambar 2.5 Wawancara dengan Ibu Fatimah.....	62
Gambar 3.1 Wawancara dengan Ibu Yuli Nurfatma	62
Gambar 3.2 Profil Kantor Balai Desa Pendowo Asri	63
Gambar 3.3 Pembangunan-pembangunan Infrastruktur	66
Gambar 3.4 Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	69
Gambar 3.5 Kegiatan Program Ibu-ibu PKK	70
Gambar 4.1 Kegiatan Karang Taruna.....	71
Gambar 4.2 Kegiatan Pembinaan Masyarakat berupa Pelatihan	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 Surat Plagiarisme

Lampiran 8 SK Judul



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul **“Integritas Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Di Desa Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang)”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Integritas merupakan standar moralitas yang tertanam pada individu seseorang sehingga penilaian baik atau tidak integritas individu terlihat dari moral dan etika yang dimiliki individu tersebut. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur, memiliki karakter yang penuh kebajikan, memiliki kemampuan yang kuat dan menebarkan sikap moral yang positif dalam kehidupan.¹
2. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan.²
3. Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, berarti pula pengaturan atau pengurusan manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu agar tujuan tersebut bisa terlaksana secara efektif dan efisien.³
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴ Dana Desa tersebut kemudian digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan desa.⁵

¹Enslikopedia, (Jakarta : Balai Pustaka,Cetakan ke empat, Edisi III, 2002),h.707.

²Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012),h.31.

³Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*.(Jakarta;PT. Gramedia, 2007),h.47.

⁴Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015),h.9.

⁵Visi Yustisia,*Ibid*.h.17.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maka penulis memasukkan bahwa judul Integritas kepala desa dalam mengelola dana desa adalah untuk melihat bagaimana seorang kepala desa yang memiliki karakter kepribadian yang baik, jujur dan amanah dalam mengelola dana desa untuk mengimplementasikan kebijakannya. Maka dalam hal ini penulis meneliti Integritas Kepala Desa di Desa Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Setelah riset yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat adanya ketidakseimbangan yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan keterbukaan mengenai pengelolaan dana desa yang ada di Desa Pendowo Asri.

2. Secara Subjektif

- a. Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang peneliti tekuni yaitu Pemikiran Politik Islam, khususnya pada mata kuliah otonomi daerah terkait dengan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Penelitian ini didukung dengan sarana dan prasarana serta literatur ataupun data-data yang tersedia yang menunjang dalam penelitian ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu tahapan yang dilakukan yaitu dengan membangun desa-desa mandiri dan pembangunan yang berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Kepala desa bertugas memberikan kebijakannya dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk memberikan pelayanan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.⁷

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian dana desa merupakan wujud

⁶Deswandi, "Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (Add) 2017 Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Ketapang Lampung Selatan), h.8.

⁷Widjaja, loc.cit, h.31.

dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri, berdasarkan partisipasi masyarakat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.⁹

Perwujudan integritas seorang pemimpin mempunyai beberapa tahapan dalam pengelolaan dana desa yaitu kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi.¹⁰ Tahapan-tahapan tersebut mendorong sebuah instansi pemerintah khususnya pemerintah Desa Pendowo Asri agar bertanggungjawab terhadap kinerja mereka dalam membangun desa. Pertama adalah kejujuran, kejujuran artinya bagaimana Kepala Desa secara jujur menjelaskan pencapaian tujuan dari program-program kerja yang realisasikan melalui penggunaan pengelolaan dana desa. Berdasarkan yang diungkapkan oleh bapak Hendri selaku kepala desa, beliau menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dituangkan dalam program-program pembangunan infrastruktur dan pengembangan sosial ekonomi yaitu perbaikan jalan yang ada didusun-dusun terpencil, pembangunan kantor PKK, pembangunan jembatan penghubung, lahan pribadi milik kepala desa yang dikelola oleh anggota karang taruna dalam bentuk tumpang sari lahan dengan menanam singkong, pembangunan gerbang masuk desa seperti gapura dengan mencirikan khas lampung seperti adanya bentuk siger dalam pembangunan gapura tersebut, membuat gorong-gorong beton di area balai desa dan membuat taman kecil-kecilan dilapangan. Program-program tersebut sudah berjalan dengan baik namun masih ada program yang belum terlaksana secara optimal.

Kedua adalah objektivitas, program posyandu lansia dan balita dan program dari kelompok PKK, objektivitas terlihat sudah baik dalam program posyandu lansia dan balita dikarenakan setiap lansia bebas dan tidak ada batasan untuk mengikuti kegiatan ini dan bahkan untuk posyandu balita itu sendiri diwajibkan para orang tua agar mengikuti kegiatan posyandu tersebut untuk sang buah hati. Selanjutnya adalah kegiatan dari kelompok PKK dengan sasaran ibu-ibu rumah tangga yaitu membuat program kerajinan sulam kain, jual beli beras petani, dan membuat telur asin.¹¹

⁸Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. (Jakarta: Erlangga, 2014),h.105-106.

⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁰Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu , 2013), h.10.

¹¹Bapak Hendri, *selaku Kepala Desa Pendowo Asri*, wawancara tatap muka, 02 November 2019 pukul 16.44 WIB.

Ketiga adalah transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Pendowo Asri. Transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah desa untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai guna mendapatkan informasi yang akurat. Keempat adalah inovasi, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu membuat embung pariwisata yang akan dibangun di dusun 01 RT 07 seluas 3 hektar. Dalam pembangunan embung tersebut terdiri dari sarana saung-saung, kedai-kedai makanan dan lahan parkir yang luas. Rancangan inovasi tersebut sudah dimasukkan kedalam anggaran dana desa dalam rencana kegiatan pembangunan pada tahun 2021 namun belum dipastikan kapan program tersebut akan direalisasikan.¹²

Dari beberapa prinsip tahapan-tahapan yang telah dijelaskan diatas, masih adanya program pengelolaan dana desa di Desa Pendowo Asri masih yang belum berjalan secara optimal dan adanya kesenjangan terkait dengan keterbukaan, karena dalam hal tersebut masih ada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana sistematika pengelolaan dana desa yang dikelola oleh aparatur desa setempat. Untuk lebih sistematis, jelas, dan lebih terarah perlu adanya pengelompokan dan pembatasan masalah yang tegas. Maka penulis memfokuskan penelitian ini pada aspek Integritas Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa di Desa Pendowo Asri kecamatan Dente Teladas kabupaten Tulang Bawang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dibatasi dengan perumusan masalah yang lebih fokus dan mengkaji lebih dalam. Pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi konsentrasi penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana perwujudan integritas kepala desa dalam mengelola dana desa di Desa Pendowo Asri?
2. Bagaimana konsistensi dari pelaksanaan bidang-bidang yang tersalurkan dalam penggunaan anggaran dana desa?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perwujudan integritas kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Pendowo Asri.
2. Untuk mengetahui konsistensi dari pelaksanaan bidang-bidang yang dituangkan dalam penggunaan anggaran dana desa.

¹²Bapak Marwanto, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, wawancara tatap muka, 02 Februari 2020 pukul 20.16 WIB.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau acuan penelitian yang dilakukan melalui aspek kajian tentang integritas kepala desa dalam pengelolaan dana desa.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti; untuk menambah pengetahuan dan agar kedepannya mampu mencontoh agar bisa menjadi pemimpin yang berintegritas.
 - b. Bagi Aparatur Desa; dapat dijadikan rujukan bagi para aparatur desa untuk dapat mengemban tugas secara amanah dan jujur dalam mengelola dana desa dan juga dapat mengevaluasi proses pengelolaan dana desa serta meningkatkan kinerja para aparatur desa untuk terwujudnya desa yang lebih maju khususnya pada di desa Pendowo Asri.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.¹³ Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis sedangkan penelitian adalah memikirkan yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.¹⁴ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan terhadap integritas kepala desa dalam mengelola dana desa yang dilaksanakan di Desa Pendowo Asri.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian untuk mengetahui, menjelaskan, mengolah, menafsirkan fenomena sosial tertentu dengan mendeskripsikan secara terperinci dan objektif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif yang lebih ditekankan adalah aspek kualitas data dan proses kegiatan objek yang akan diteliti. Maka memerlukan sumber data yang benar-benar bisa menjelaskan masalah dalam penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Berikut data informan dalam penelitian ini sebagai berikut;

¹³Cholid Nurboko, Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,1997), h.20.

¹⁴Usman Husain, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000),h.42.

Tabel 1.1
Data Informan

No.	Nama	Jabatan	Tempat/Tanggal Wawancara
1.	Bapak Hendri	Kepala Desa Pendowo Asri	Rumah pribadi/ 2 November 2019 (wawancara pertama) dan 8 juli 2020 (wawancara kedua)
2.	Bapak Santoso	Sekretaris Desa	Kantor balai desa/26 juni 2020
3.	Bapak I Nyoman Sudire	Bendahara	Kantor balai desa/27 juni 2020
4.	Bapak Marwanto	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rumah pribadi/2 february 2020
5.	Bapak Yansen Rele	Kepala Seksi Pemerintahan	Kantor balai desa/26 juni 2020
6.	Bapak Sudibyo	Masyarakat Pendowo Asri	Rumah pribadi/6 juli 2020
7.	Bapak Sarju	Masyarakat Pendowo Asri	Rumah pribadi/8 juli 2020
8.	Ibu Wahyu	Masyarakat Pendowo Asri	Rumah pribadi/8 juli 2020
9.	Ibu Fatimah	Masyarakat Pendowo Asri	Rumah pribadi/9 juli 2020
10.	Ibu Yuli Nurfatma	Masyarakat Pendowo Asri	Rumah pribadi/8 juli 2020
11.	Bapak Slamet Daromi	Kabid Pembangunan BPD	Via WhatsApp/29 januari 2021
12.	Bapak Nur Rohman	Ketua BPD	Via WhatsApp/25 januari 2021

b. Data Sekunder

Dalam data sekunder peneliti menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait desa dan pengelolaan penggunaan dana desa, serta dokumentasi terkait objek penelitian.

3. Populasi dan Tempat Penelitian

a. Populasi

Populasi terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparatur desa, anggota BPD dan masyarakat. Sedangkan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini peneliti menetapkan 12 informan dalam penelitian ini yang sudah dijelaskan di dalam data primer.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah;

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan data-data mengenai hal yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk merumuskan buah pikiran atau perannya yang tepat guna mendapatkan informasi dan data-data sosial. Orang-orang yang dipandang tahu situasi sosial tersebut yaitu kepala desa, aparatur desa, kbid pembangunan BPD, anggota BPD dan masyarakat di Desa Pendowo Asri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai metode utama untuk menggali data dokumentasi yang berkenaan dengan kondisi masyarakat yang terdiri dari fakta-fakta yang terjadi.¹⁵ Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah memuat data-data berupa arsip sejarah desa, demografi desa, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, struktur desa, laporan anggaran dana desa, dan peraturan Desa Pendowo Asri.

5. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema pokoknya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008), h.202.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajiakan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang padat dan jelas.

c. Verifikasi Data

Untuk menarik kesimpulan peneliti menggunakan analisis pendekatan induktif. Adapun analisis induktif yaitu cara menganalisa data dengan mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum.¹⁶



¹⁶Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,1988), h.2.

BAB II

INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA

A. Integritas Kepala Desa

1. Konsep Integritas

a. Pengertian Integritas

Integritas berasal dari bahasa Latin: *integer, incorruptibility, firm adherence to a code of especially moral acristic values*, adalah sikap yang teguh mempertahankan prinsip tidak mau korupsi, dan merupakan dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai bentuk nilai-nilai moral. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata integritas mengandung pengertian yaitu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.¹⁷

Dalam pandangan etika, integritas dapat diartikan juga sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai-nilai keyakinan, prinsip yang dipegangnya dan memiliki kemampuan untuk memimpin.¹⁸

Berbagai sifat-sifat dan kemampuan tertentu yang dimiliki individu pasti digabungkan dengan nilai kejujuran dan berbagai sikap positif lainnya, itulah yang dinamakan sebagai integritas. Kompetensi dalam bidangnya juga bagian dari integritas karena, tanpa adanya kompetensi maka sulit untuk menunjukkan integritas itu sendiri. Integritas merupakan sebuah hasil usaha seseorang yang berhasil sebagaimana orang untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu kenyataan.

Teori menurut **Hendrajatno dan Budi Rahardja** mengenai perwujudan nilai integritas seorang pemimpin antara lain:

1) Harus Memegang Teguh Prinsip.

Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Dapat di katakan juga bahwa konsistensi ialah kesesuaian antara perkataan dan tindakan, Konsistensi terjadi apabila ada kesesuaian antara yang dijanjikan dengan apa yang diwujudkan dalam kenyataan yang secara nyata dapat disaksikan atau dialami oleh banyak orang.

2) Berprilaku Terhormat.

Berperilaku terhormat yaitu dengan menghindarkan diri dari segala kecurangan dan praktik-praktik yang melanggar peraturan dan kode etik yang berlaku. Berperilaku terhormat merupakan cerminan budaya sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan. Menjaga martabat berarti kemampuan untuk menjaga nilai-

¹⁷ Anggara Wisesa, *Integritas Moral Konteks Pengambilan Keputusan Etis*, Vol. 10 No 1, 2011.

¹⁸ Abdi Tanjung, *Pentingnya Integritas Pemimpin Dalam Memberantas Korupsi Di Kota Padangsidimpuan Dan Kaitannya Dengan Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan)*, Vol.7 No.1 Edisi Januari 2019.

nilai positif dalam dirinya, seseorang yang bermartabat tentunya tidak akan melakukan perbuatan tercela seperti korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

3) Jujur.

Jujur yaitu apa yang dikatakan seseorang yang berintegritas harus sesuai dengan hati nuraninya dan apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Seorang pemimpin yang jujur tentu akan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dalam pemerintahan desa khususnya dalam pembangunan di desa.¹⁹

4) Memiliki Keberanian.

Seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan yang benar dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat meskipun keputusan tersebut banyak prokontra. Pemimpin yang berani merupakan pemimpin yang mempunyai cara-cara yang baik dan menghasilkan hasil yang positif dalam negosiasi yang dilakukan untuk menentukan suatu keputusan penting terkait keputusan bersama dalam suatu organisasi.

5) Melakukan Tindakan Berdasarkan Pada Keyakinan Akan Keilmuannya yang Tidak Ceroboh.

Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan artinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan atau pemanfaatan outputnya. Seorang pemimpin melaksanakan tugas harus fokus menyeluruh. Fokus menyeluruh memiliki beberapa pemahaman antara lain: komprehensif (dari perencanaan hingga evaluasi), inklusif, dan utuh.²⁰

b. Fungsi Integritas

Adapun fungsi Integritas yang diantaranya yaitu:

- 1) Integritas berfungsi memelihara moral atau akhlak seseorang yang kemudian mendorong dia untuk memiliki pengetahuan yang luas. Berhubung akhlaknya yang tinggi (self insight), semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, semakin terasa bodoh. Sebab, andaikan lautan dijadikan tinta dan daun-daun sebagai kertas untuk menulis ilmu langit, tidak akan cukup. Itulah sebabnya, seorang yang berintegritas, otomatis “ringan tangan” membantu orang lain sebagai manifestasi dari fungsi self reflection-nya. Dia tidak hanya sekedar simpati, tetapi juga empati, yakni turun lapangan, membantu dengan pikiran, dana, dan tenaganya.
- 2) Integritas berfungsi memelihara nurani seseorang agar tetap hanif sebagai seorang hamba agar jelas perbedaan di antara dirinya dengan hewan. Sebab, secara biologis,

¹⁹Muhammad Yusuf, *Pengaruh Kompetensi, Objektivitas dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor (Studi Empiris pada Auditor Bpkp Provinsi Riau)*, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Padang, Pada Tahun 2014.

²⁰Zahra, *Pengaruh Integritas, Kompetensi dan Loyalitas Kepemimpinan Terhadap Kepercayaan Para Bawahan di Sbu Perkapalan PT. Pusri Palembang*. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, 2011, ISSN: 2085-1375.

manusia dan hewan, sama-sama memiliki hepar (hati), tetapi hewan tidak memiliki qalb, sesuatu yang ada di diri setiap manusia. Jika seseorang senantiasa mengikuti qalbnya (nuraninya), dia menghargai diri sendiri sebagai makhluk terhormat yang diciptakan Allah lebih mulia dari makhluk lain.

c. Manfaat Integritas

- 1) Manfaat secara intelektual
Dengan mental dan pengetahuan kita dapat mengoptimalkan kemampuan otak kita.
- 2) Manfaat secara emosional
Diri menjadi penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, solidaritas tinggi dan sarat kehangatan emosional dalam interaksi kerja.
- 3) Manfaat secara sosial
Mampu mengembangkan hubungan baik satu sama lain dalam lingkungan masyarakat mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang menuntut kelompokan dan kerja sama yang baik, memiliki kepekaan hati dan perasaan untuk selalu memberi tempat bagi orang lain di dalam hati kita.
- 4) Manfaat secara spiritual
Menjadikan diri jadi lebih bijaksana dalam memaknai segala sesuatu termasuk pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan contohnya keberhasilan, kegagalan dan penderitaan.²¹

2. Konsep Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa atau sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.²²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26-30 dikatakan bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan perwakilan desa. Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Peraturan Pemerintah tersebut dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dihitung sejak yang bersangkutan dilantik.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 kepala desa adalah pemimpin untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) yang mengatakan tugas Kepala

²¹<http://www.gurupendidikan.co.id/integritas-adalah/> diakses pada tanggal 30 Mei 2020 pukul 12:23.

²²Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 5-6.h.4.

Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Syarat – Syarat Menjadi Kepala Desa

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kepala desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 33 Tentang Desa yaitu :

- 1) Warga negara Republik Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

c. Tugas Kepala Desa:

Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dan berikut beberapa uraian mengenai tugas kepala desa;

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa
- 3) Menetapkan peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina ekonomi desa
- 7) Mengordinasikan pembanguna desa secara partisipatif
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Wewenang Kepala Desa

Wewenang kepala desa yang ada dalam UU Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi pemerintahan, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (iii) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini

- sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 2) Fungsi regulasi, meliputi (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 UU Desa).
 - 3) Fungsi ekonomi, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - 4) Fungsi sosial, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

e. Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa mempunyai hak, dan kewajiban yang diatur dalam pasal UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26, yaitu kewenangan yang diatur pada ayat (2); hak-hak yang timbul diatur pada ayat (3); dan kewajiban diatur pada ayat (4). Pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib;

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- 3) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan,
- 4) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.²³

f. Pemberhentian Kepala Desa

Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terdapat ketentuan ayat (2) Pasal 8, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
- 2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) berakhir masa jabatannya;
 - b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d) melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e) adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

²³Penjelasan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- f) tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
 - g) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.
 - 4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
 - 5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.²⁴

B. Pengelolaan Dana Desa

1. Konsep Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang setiap bidang mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan dana desa sebagai berikut;

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
- c. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- e. Dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan penganggarannya mengikuti proses mekanisme yang berlaku.²⁵

2. Kebijakan Penggunaan Dana Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan

²⁴Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

²⁵Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2016),.h.45.

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.²⁶

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku. Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Beberapa prioritas penggunaan dana desa menurut Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yaitu:

- a. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Penggunaan dana desa harus dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang;
- c. Penggunaan dana desa harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa;
- d. Penggunaan dana desa tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia yang berada di desa;
- e. Penggunaan dana desa harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa seperti pengadaan pembangunan, hingga pengembangan serta pemeliharaan harta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan seperti transportasi, energi, dan beberapa manfaat kebutuhan lainnya;
- f. Dana desa harus dapat meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa berupa kegiatan di bidang kesehatan (penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makan tambahan untuk bayi dan balita, hingga pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui serta beberapa kegiatan lainnya);
- g. Penggunaan dana desa seperti Program Pembangunan Sarana Olahraga Desa serta peningkatan SDM yaitu Program Kegiatan Padat Karya termasuk penanganan masalah kemiskinan dan juga pengangguran di desa dengan menciptakan lapangan kerja baru, harus diputuskan melalui musyawarah desa.²⁷

²⁶Op.cit.,UU Nomor 6 Tahun 2014.

²⁷Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

3. Asas-asas Pengelolaan Dana Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

a. Transparan

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan dana desa.

b. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. pengelolaan dana desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.²⁸

²⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Tujuan Dana Desa

- a. Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru;
- b. Selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan;
- c. Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri;
- d. Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

5. Manfaat Dana Desa

Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- a. Pengentasan Kemiskinan
Dengan adanya dana desa ini, masyarakat bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitasnya dan memperbaiki kualitas hidup di desa.
- b. Dana Desa untuk Pemerataan Pembangunan
Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan.
- c. Dana Desa untuk Menahan Laju Urbanisasi
Dana desa bukan hanya untuk mengentaskan desa dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak ber-urbanisasi. Penggunaan dana desa tersebut menciptakan peluang kerja bagi anak muda dan menunjukkan bagaimana dana desa mampu mendorong kreativitas warga desa menciptakan peluang-peluang pendapatan baru dalam skala yang signifikan.²⁹

²⁹<http://www.wartaekonomi.co.id/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa/> diakses pada tanggal 02 juni 2020 pukul 21.28.

C. Tinjauan Pustaka

Dalam mengungkapkan pemahaman tentang integritas kepala desa dalam mengelola dana desa di desa pendowo asri maka diperlukan adanya kajian yang relevan dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut ;

1. Skripsi yang berjudul ***“Peranan Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015)”*** karya Waniarsih 2017. Dalam skripsi ini penggunaan dana desa hanya mencakup dua aspek yaitu dalam hal pembangunan dan pemberdayaan sedangkan dalam aspek pembinaan masyarakat tidak dilaksanakan.³⁰ Perbedaan dengan skripsi ini dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa melibatkan segala aspek dalam tahapan pembangunan baik perencanaan, pelaksanaan, pembangunan.
2. Skripsi yang berjudul ***“Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”*** karya Dhini Setya Werdhani 2018. Keefektifitasan dalam penggunaan dana desa yang terealisasi nya pembangunan gorong-gorong dan irigasi, namun minimnya SDM yang belum menguasai teknologi terkait dalam pelaporan pengelolaan dana desa.³¹ Perbedaan dengan skripsi ini adalah meninjau terkait pengelolaan dana desa dalam segala bentuk program termasuk dalam pembangunan infrastruktur.
3. Skripsi yang berjudul ***“Kemampuan Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa (Studi di Desa hanauberak kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran)”*** karya Abdul Aziz 2018. Dalam penelitian ini aparatur desa dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai sasaran dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun adanya kekurangan dalam sarana dan prasarana dan minimnya SDM sebagai control sosial dalam pengoptimalisasi pembangunan desa.³² Perbedaan pada skripsi ini mengkaji peran kepala desa selama menjadi pemimpin desa dalam mengelola dana desa dalam menunjukan keterbukaan kepada masyarakat terkait informasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan dana desa.

Pada skripsi yang peneliti susun tentunya akan berbeda dengan tinjauan pustaka diatas yang telah membahas mengenai kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan kajiannya pada aspek Integritas Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu terkait program pelaksanaan pembangunan dan tinjauan mengenai pengelolaan dana desa khususnya di Desa Pendowo Asri kecamatan Dente Teladas kabupaten Tulang Bawang.

³⁰Waniarsih, *“Peranan Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015)”*, Pada Tahun 2018.

³¹Dhini Setya Werdhani, *“Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”*, Pada Tahun 2018.

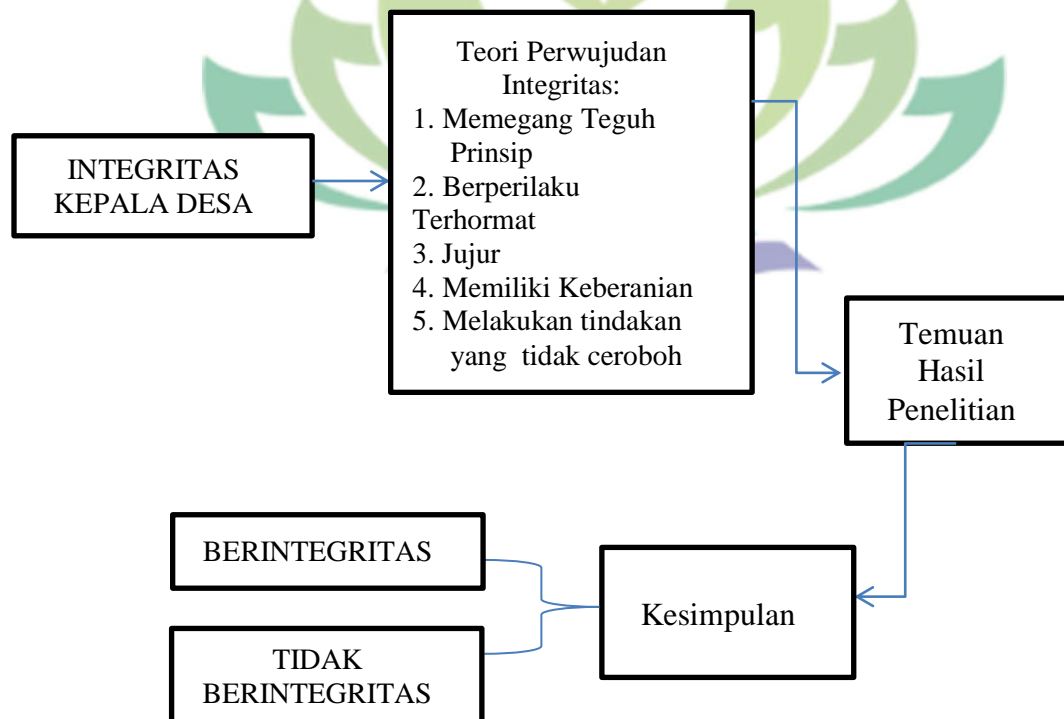
³²Abdul Aziz, *“Kemampuan Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa (Studi di Desa hanauberak kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran)”*, Pada Tahun 2018.

D. Kerangka Pikir

Keberhasilan pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa mutlak didukung oleh kepercayaan semua masyarakat agar menjadi desa yang berkembang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini menyangkut bagaimana perwujudan integritas dari kepala desa yang berperan sebagai penggerak utama dalam pengelolaan dana desa, tata kelola program yang diwujudkan dalam penggunaan anggaran dana desa, dan implementasi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Teori dalam perwujudan integritas yang dikemukakan oleh tokoh Hendrajatno dan Budi Rahardja mencakup lima aspek yaitu; Harus memegang teguh prinsip; Berperilaku terhormat; Jujur; Memiliki keberanian; Memiliki tindakan berdasarkan pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak ceroboh. Integritas merupakan kunci keberhasilan dalam memajukan desa, maka perlunya menguji aspek integritas Kepala Desa di desa Pendowo Asri dalam pengelolaan dana desa untuk melihat sejauh mana masyarakat merasa puas dengan kinerja aparatur desa dan mampu menjadi kepala desa yang jujur, amanah serta berani memutuskan suatu keputusan yang mencakup kepentingan publik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihat melalui kerangka pikir sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kerangka Pikir



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2008, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara.
- Agus Dwiyanto, 2003, *Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Cholid Nurboko, Abu Achmad. 1997. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Ensiklopedia, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarata: Balai Pustaka, Cetakan Ke Empat, Edisi III.
- Mudrajad Kuncoro. 2014. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi: Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlanga.
- Mulyadi. 2007, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta; PT. Gramedia.
- Moeloeng Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mohamad Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Malang: Setara Pres.
- Usman Husain, Purnomo Setiady. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjudin Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh: Read.
- Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber Jurnal

- Abdi Tanjung, *Pentingnya Integritas Pemimpin Dalam Memberantas Korupsi Di Kota Padangsidimpuan Dan Kaitannya Dengan Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan)*, Vol.7 No.1 Edisi Januari 2019. (Diakses 27 Mei 2020, 14:20 WIB)
- Anggara Wisesa. *Integritas Moral Konteks Pengambilan Keputusan Etis*, Vol. 10 No 1, 2011. (Diakses 27 Mei 2020, 20:15)
- Abdul Aziz, *Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa (Studi di Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*, Pada Tahun 2018 (Diakses 19 Oktober 2019, 20:10 WIB).
- Blog, Hidayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, “*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005. (Diakses 26 November 2019, 21:12 WIB).
- Deswandi, *Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)*, Pada 2017, (Diakses 25 Oktober 2019, 17:01 WIB).
- Dhini Setya Werdhani, *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)*, Pada Tahun 2018. (Diakses 27 November 2019. 10:15 WIB)
- Muhammad Yusuf, *Pengaruh Kompetensi, Objektivitas dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor (Studi Empiris Pada Pada Auditor Bpkp Provinsi Riau)*, Fakultas Ekonomi Program Studi Akutansi, Universitas Negeri Padang, Pada Tahun 2014. (Diakses 30 Mei 2020. 10:58 WIB)
- Waniarsih, *Peranan Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015)*, Pada Tahun 2018. (Diakses 20 Januari 2020, 22.25 WIB).

Zahra, Pengaruh Integritas, Kompetensi, dan Loyalitas Kepemimpinan Terhadap Kepercayaan Para Bawahan di Sbu Perkapalan PT. Pusri Palembang, *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 2011. (Diakses 30 Mei 2020, 14:20 WIB)

Sumber Wawancara

Bapak Hendri, *Wawancara dengan Kepala Desa*, Wawancara tatap muka, 02 November 2019 dan wawancara pada tahap kedua 8 juli 2020.

Bapak Marwanto, *Wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan*, Wawancara tatap muka, 02 februari 2020.

Bapak Santoso, *Wawancara dengan Sekretaris Desa*, Wawancara tatap muka, 26 juni 2020.

Bapak I Nyoman Sudire, *Wawancara dengan Bendahara Desa*, Wawancara tatap muka, 27 juni 2020.

Bapak Yansen Rele, *Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan*, Wawancara tatap muka, 26 juni 2020.

Bapak Sarju, *Wawancara dengan Masyarakat*, Wawancara tatap muka, 8 juli 2020.

Bapak Sudiby, *Wawancara dengan Masyarakat*, Wawancara tatap muka, 6 juli 2020.

Ibu Yuli Nurfatma, *Wawancara dengan Masyarakat*, Wawancara tatap muka, 8 juli 2020.

Ibu Fatimah, *Wawancara dengan Masyarakat*, Wawancara tatap muka, pada hari kamis tanggal 9 juli 2020.

Ibu Wahyu, *Wawancara dengan Masyarakat*, Wawancara tatap muka, 8 juli 2020.

Bapak Nur Rohman, *Wawancara dengan Ketua BPD*, Wawancara via whatsApp, 25 Januari 2021.

Bapak Slamet Daromi, *Wawancara Dengan Ketua BPD dalam Bidang Pembangunan*, Wawancara via whatsApp 29 Januari 2021.

Sumber Peraturan

Penjelasan Atas *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 5-6.

Sumber On-Line

<http://ot.id.tips-profesional>. (Diakses 26 November 2019, 12:18 WIB).

<http://www.gurupendidikan.co.id/integritas-adalah/> (Diakses 30 Mei 2020, 12:23 WIB).

<http://www.wartaekonomi.co.id/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembnagunan-ekonomi-desa/> (Diakes 02 Juni 2020, 21:28 WIB).

<http://www.gobleg-buleleng.desa.id/tugas-pokok-dan-fungsi-kasi-kesra/> (Diakses 22 Juli 2020, 23:12 WIB).

<http://www.juraganberdesa.co.id/> (Diakses 22 Juli 2020, 23:29 WIB).

Amirruddin, Muahammadiyah, dan Ruskin Azikin. 2012. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kelaenan Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Voleme II nomor 1. (Diakses 23 Desember 2019, 19.15 WIB).

Pahlevi, 2017, Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur), Jurnal Penelitian Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Univeritas Lampung. (Diakses 22 Desember 10.00 WIB).

